

**PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PENERAPAN SISTEM  
AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Akuntansi*



Oleh :

Nama : Khairina Adriani  
NPM : 1405170802  
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **KHAIRINA ADRIANI**  
N P M : **1405170802**  
Program Studi : **AKUNTANSI**  
Judul Skripsi : **PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BINJAI**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI, S.E., Ak, M.Si., CA

Pembimbing

HENY TRIASTUTI, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Sekretaris

ADE GUNAWAN S.E., M.Si



H. M. YUSUF, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : KHARINA ADRIANI  
N.P.M : 1405170802  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI,  
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan sidang skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

HENY TRIASTUTI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, M.M. M.Si

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairina Adriani  
NPM : 1405170802  
Program Studi : S-1  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data quisioner yang digunakan pada skripsi ini atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh secara langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**KHAIRINA ADRIANI**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : KHARINA ADRIANI  
N.P.M : 1405170802  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN  
Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/18 /3	- Revisi paragraf - Daftar isi - Populasi & Sampel		
19/18 /3	- Pembahasan - Kesimpulan - Daftar pustaka		
20/18 /3	Ace dip Syari Belajar sendiri		

Medan, 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(HENY TRIASTUTI, SE, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

**KHAIRINA ADRIANI (1405170802), Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan 2018.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Populasi yang digunakan SKPD Kota Binjai. Jenis dan penelitian ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji f dan koefisien determinasi (R-square).

Berdasarkan hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa secara persial. Kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara simultan dengan menggunakan uji f menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan Adjusted R Square sebesar 81,1 % nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah sedangkan 18,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini, dimana skripsi ini sangat penulis butuhkan dalam rangka sebagai kelengkapan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai”**

Dengan segala keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan para pembaca berkenan memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, pertama kali penulis ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun tidak begitu sempurna.

Selanjutnya, tak lupa penulis juga dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

- 1) Teristimewa kepada kedua orang tua penulis tercinta, ayahanda (ALM) Drs.Ali Adenin dan ibunda Elma Riani yang telah banyak berkorban baik moral maupun materil selama penulis menjalani pendidikan, serta berkat

doa, dorongan dan semangat dari mereka penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.

- 2) Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3) Bapak H. Januri, SE, M.M, M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4) Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 5) Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekertaris jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6) Ibu Heny Triastuti, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7) Ibu Seprida Hanum, SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu serta memberikan arahan pada setiap kegiatan perkuliahan yang saya lakukan.
- 8) Keluarga yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil abang tercinta Muhammad Vicky Adha S.H, Muhammad Adrian S.H serta kakak tercinta Siti Syarah Adriani SKM.
- 9) Untuk sahabat-sahabat terbaik penulis Nurul Quartina, Fahrudin Dini, Yuliana Butar-butar yang selalu setia menemani penulis dalam hal suka maupun duka.
- 10) Terkhusus untuk teman-teman saya Muhammad Farhan, Rizky Ramadhan, wahyu Andika, Baktiar Tarnando, Zaki Nurzaman serta teman-teman G Akuntansi Siang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

11) Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian proposal skripsi ini

12) Seluruh Staff Administrasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, Aamiin... ya Rabbal Alaamiin...

Medan, Maret 2018

Penulis

**KHAIRINA ADRIANI**

**1405170802**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11

### **BAB II LANDASAN TEORI**

2.1 Uraian Teoritis .....	12
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan .....	12
2.1.2 Kompetensi Staf Akuntansi.....	13
2.1.3 Penerapan Sistem Akuntansi.....	19
2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Konseptual .....	29
2.3.1 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	29
2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	30
2.3.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah	
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	31
2.3.4 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	31
2.4 Hipotesis .....	33

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian.....	35
3.2 Definisi Operasional.....	35
3.2.1 Variabel Dependen .....	35
3.2.2 Variabel Independen .....	36
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.4 Sampel Dan Populasi.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	49
4.1.1 Data Penelitian.....	49
4.1.2 Hasil Uji Validitas.....	50
4.1.3 Hasil Reliabilitas .....	51
4.2 Deskripsi Data Secara Statistik .....	52
4.2.1 Tingkat Identitas Responden .....	52
4.2.2 Tingkat Jawaban Responden .....	54

4.3 Pengujian Asumsi Klasik.....	62
4.3.1 Uji Normalitas .....	62
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	64
4.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	64
4.4 Analisis Data .....	66
4.4.1 Regresi Linier Berganda.....	66
4.5 Koefisien Determinasi (R-Square) .....	67
4.6 Pengujian Hipotesis .....	68
4.6.1 Uji t (persial).....	68
4.6.2 Uji f (simultan).....	69
4.7 Pembahasan.....	71
4.7.1 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	71
4.7.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	72
4.7.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	73
4.7.4 Pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	74

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran.....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

1. Tabel I.1 Opini LKPD Kota Binjai.....	5
2. Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....	28
3. Tabel III.1 Tahap Penelitian.....	39
4. Tabel III.2 Skala Pengukuran Likert.....	41
5. Tabel IV.1 Daftar SKPD Kota Binjai .....	49
6. Tabel IV.2 Uji Validitas.....	50
7. Tabel IV.3 Uji Reliabilitas .....	52
8. Tabel IV.4 Demografi Responden.....	53
9. Tabel IV.5 Kompetensi Staf Akuntansi.....	54
10. Tabel IV.6 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan.....	55
11. Tabel IV.7 Pengelola Keuangan Daerah.....	57
12. Tabel IV.8 Kualitas laporan Keuangan.....	60
13. Tabel IV.9 Uji Multikolinieritas Data.....	64
14. Tabel IV.10 Hasil Regresi.....	66
15. Tabel IV.11 Uji Koefisien Determinasi .....	67
16. Tabel IV.12 Uji t.....	69
17. Tabel IV.13 Uji F.....	70

## DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	33
2. Gambar IV.1 Grafik Normal P-Plot.....	62
3. Gambar IV.2 Gambar Histogram .....	63
4. Gambar IV.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah sekarang ini masih terdapat yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP) yang tertuju kepada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang merupakan unsur terpenting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (LKPD). Berdasarkan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan “ SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan ”. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah diindonesia.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor (Erlina dan Rasdianto, 2013:21). Perlu disadari bahwa terdapat

banyak pihak yang akan mengandalkan laporan keuangan yang disusun sebagai sumber informasi bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan di publikasikan harus disajikan secara wajar bebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan para pengguna, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika informasi yang disajikan valid dan dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkannya. Apabila laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat dalam penyampaian maka itu akan berdampak buruk bagi pengguna laporan keuangan (mahmudin,2010).

Akibat lain dari informasi yang salah dan menyesatkan tersebut adalah para pengguna laporan yang kritis dan rasional akan bereaksi dengan memberikan kritikan atau menuntut pemerintah selaku penyaji laporan keuangan karena telah memberikan informasi yang salah dan menyesatkan sehingga pengguna laporan tersebut merasa dirugikan secara material akibat terlalu percaya dengan laporan tersebut. Jika pemerintah mengabaikan reaksi dari pengguna laporan tersebut atau cenderung membela diri, maka pemerintah akan membuat laporan keuangan yang buruk kualitasnya. Untuk menghindari hal tersebut satu-satunya cara adalah pemerintah harus terbuka untuk menerima kritik dan masukan serta berusaha terus untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan. Mardiasmo (2009:174) mengungkapkan bahwa pemberian informasi keuangan yang tidak

andal akan mempengaruhi kualitas keputusan bagi pihak external maupun internal.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah (PP 71 tahun 2010) antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

- 1) Relevan: Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan. Atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (predictive value), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (feedback value). Dan agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (timeliness).

2) Andal: Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

a) Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b) Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

c) Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

3) Dapat dibandingkan: Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

4) Dapat dipahami: Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna

Laporan keuangan daerah berpedoman pada SAKD dan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan. BPK dapat memberikan empat opini berupa: opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang terjadi di Kota Binjai tahun 2012 sampai 2016.

**Tabel I.1**

**Opini LKPD Kota Binjai**

No.	Tahun	Opini
1	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2014	Wajar Tanpa Penecualian Dengan Paragraf Penejelas (WTP DPP)
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2016	Wajar Tanpa Penecualian (WTP)

Sumber : <http://www.bpk.go.id>

Disamping beberapa laporan keuangan instansi pemerintahan yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 revisi dari Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2005, masih terdapat beberapa laporan keuangan instansi yang komponen laporannya belum sesuai dengan PP no 71 tahun 2010 yaitu, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih,

neraca, arus kas, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang diketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi staf yang dimiliki akuntansi sendiri maka penyusunan laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Ni Luh Nyoman, dkk 2014).

Jadi dengan adanya kompetensi staf akuntansi dapat diketahui apakah pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Dengan demikian masyarakat ataupun para investor dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunanya.

Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Nyoman, Dkk (2014) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2014) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan mendapatkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena sumber daya manusia kurang mempunyai kompetensi staf akuntansi yang cukup.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pemendagri No. 21 Tahun 2011). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Kepmendagri No. 64 Tahun 2013).

Selain menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah juga harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Megawati, Dkk (2015) menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Ihsanti (2014)

yang menemukan dalam penelitiannya bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan pegawai di bidang keuangan dalam menyusun laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunaannya.

Hasil penelitian yang mendukung mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dewi, dkk (2014) mendapatkan hasil yang berpengaruh antara pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian Hadi (2016) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa Pengelolaan Keuangan

Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian Nyoman, dkk (2014) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Megawati, dkk (2015) penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan Dewi, dkk (2014) pengaruh pemahaman akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Karena penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian tersebut maka penelitian ini berbeda dari penelitian yang terdahulu.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat di identifikasikan masalah:

- 1) Laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi karakteristik kualitatif.
- 2) Masih terdapat beberapa laporan keuangan pemerintahan yang belum menerapkan PP no 71 tahun 2010 revisi PP no 24 tahun 2005.

- 3) Komponen laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PP no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah kompetensi staf akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai?
- 2) Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai?
- 3) Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai?
- 4) Apakah kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

- 1) Menguji kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai.
- 2) Menguji penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai.
- 3) Menguji pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai.

- 4) Menguji kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Binjai

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat di Bidang Teoritis**

- 1) Dapat digunakan sebagai acuan dan sumber informasi bagi penelitian yang akan datang, serta memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik.
- 2) Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

##### **b. Manfaat bagi penulis**

- 1) Penelitian ini untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **c. Manfaat bagi pemerintah**

- 1) Memberikan manfaat bagi pemerintah, yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan PSAP.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu: (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat Dipahami, dan (4) Dapat Dibandingkan.

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- 3) Laporan Operasional (LO).
- 4) Neraca.
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 6) Laporan Arus Kas (LAK).
- 7) Catatan Atas Laporan keuangan (CALK).

## **2.1.2 Kompetensi Staf Akuntansi**

### **2.1.2.1 Pengertian Kompetensi**

Pengertian kompetensi menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.

Pengertian kompetensi menurut Stephen Robbin adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Stephen Robbin 2007:38)

Staf akuntansi dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori Kompetensi Spencer. Acuan dalam teori kompetensi ini yaitu pengetahuan, keahlian dan perilaku. Kompetensi merupakan dasar karakteristik yang dimiliki seseorang yang secara kausal memiliki hubungan dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi menurut Spencer dan Spencer (1993) memiliki 5 tipe karakteristik, yaitu adanya pengetahuan (memiliki informasi dalam bidang tertentu), keterampilan (mampu dalam menjalankan tugas), motif (konsisten dan sebab dari tindakan yang akan dilakukan), konsep diri (gambaran dari diri), dan faktor bawaan (karakter dan konsistensi respon) (Salemba dalam Khasanah, 2015).

Menurut Sukrisno Agoes (2012:146) kompetensi adalah: “Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.”

### 2.1.2.2 Karakteristik Kompetensi

Kompetensi memiliki aspek-aspek tertentu yang mendorong dirinya untuk melakukan kinerja yang optimal, maka dari itu tidak semua aspek-aspek pribadi seseorang merupakan bagian dari kompetensi. Menurut Mc.Clelland, dkk. Dalam Achmad S. Ruky (2014:123) mengemukakan beberapa jenis karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi, yakni sebagai berikut:

- 1) Knowledge adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang tentang hal spesifik. Knowledge (pengetahuan) adalah sebuah kompetensi yang kompleks. Angka (nilai) hasil yang diperoleh seseorang dalam tes-tes pengetahuan sering kali gagal meramalkan prestasi kerjanya dalam melaksanakan pekerjaan yang sebenarnya karena tes-tes tersebut tidak/tidak berhasil mengukur pengetahuan (dan skills) sebagaimana mereka sebenarnya digunakan dalam pekerjaan.
- 2) Skills adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tugas tertentu bersifat fisik atau mental (juga “verbal skills”).
- 3) Motive (Motif) adalah hal-hal yang seseorang secara konsisten selalu dipikirkan atau diinginkan yang kemudian mendorongnya melakukan sebuah tindakan. Achievement Motivation menggambarkan bahwa orang-orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan secara konsisten selalu menetapkan sasaran/target yang menantang untuk dirinya sendiri, menerima tanggung jawab untuk mencapainya dan menggunakan umpan balik yang diterima untuk berprestasi lebih baik.
- 4) Traits adalah ciri-ciri (karakteristik) individu khusus bersifat fisik dan juga emosional (reaksi yang konsisten terhadap situasi-situasi dan informasi).

- 5) Self concept adalah Konsep diri adalah sikap, nilai, dan citra diri yang dimiliki seseorang. Kosep diri terdiri dari:
- a) Rasa percaya diri, yaitu keyakinan seseorang bahwa ia akan bias berprestasi dalam situasi apapun.
  - b) Nilai (Value) yang dimiliki seseorang adalah “motif reaktif” yang menentukan “jawaban” seseorang dalam jangka pendek dan terhadap situasi-situasi yang dihadapinya. Bila ia memberi nilai tinggi pada perbuatan “menolong orang” maka ia akan bereaksi cepat bila melihat ada orang yang menurutnya memerlukan bantuan/pertolongan.

### **2.1.2.3 Manfaat Kompetensi**

Menurut Prihadi (2004:57) manfaat kompetensi adalah:

- 1) Prediktor kesuksesan kerja: Model kompetensi yang akurat akan dapat menentukan dengan tepat pengetahuan serta keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan. Jika seseorang yang memiliki posisi dapat memiliki kompetensi yang dijadikan syarat pada posisinya maka dia dapat diprediksikan akan sukses.
- 2) Merekrut karyawan yang andal: Apabila telah berhasil ditentukan kompetensi apa saja yang diperlukan suatu posisi tertentu, maka dengan mudah untuk menjadi kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru.
- 3) Menjadi dasar dalam penilaian dan pengembangan karyawan: Identifikasi kompetensi pekerjaan yang akurat dapat digunakan sebagai tolak ukur kemampuan seseorang. Berdasarkan sistem kompetensi ini dapat diketahui

apakah seseorang telah mengembangkannya, dengan pelatihan dan pembinaan atau perlu dimutasikan kebagian lain

#### **2.1.2.4 Staf Akuntansi**

Memiliki staf adalah keharusan bagi setiap perusahaan, staf merupakan sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik. Mengelola sumber daya manusia berdasarkan kompetensi diyakini bisa lebih menjamin keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sebagian besar perusahaan memakai kompetensi sebagai dasar dalam memilih orang, mengelola kinerja, pelatihan dan pengembangan serta pemberian kompensasi.

Perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Noorliswati dalam Islahuddin dan Soesi (2002) memberikan sepuluh kualifikasi yang harus dimiliki akuntan dalam era globalisasi yaitu:

- 1) Mempunyai kompetensi teknis di bidang akuntansi, perpajakan, manajemen dan ilmu ekonomi.
- 2) Mempunyai kompetensi di bidang teknologi, informasi, dan penerapannya dalam lingkungan akuntansi.
- 3) Memiliki bekal ilmu pengetahuan multidisipliner sehingga ia mempunyai wawasan luas dan visi tajam ke depan.

- 4) Mampu berkomunikasi secara efektif dalam berbagai bahasa terutama bahasa Inggris.
- 5) Mampu bergaul secara efektif pada lingkungan yang multietnis dan multikultural
- 6) Mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang kompleks dan cepat berubah.
- 7) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk senantiasa bekerja.
- 8) Percaya diri, berani mengambil resiko, berintegritas tinggi, dan kuat dalam entrepreneurship.
- 9) Berorientasi outward looking.
- 10) Mampu deal in equal term dengan akuntan Amerika Serikat dan akuntan lain dari Negara maju.

Dari pernyataan diatas maka jelaslah bahwa seorang akuntan yang berkualitas adalah seorang akuntan yang memiliki sifat-sifat dan karakteristik seperti menghayati profesionalisme, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, ahli dalam bidang teknologi informasi, memiliki pengetahuan di bidang perpajakan dan pasar modal, memiliki pemikiran kreatif dan jiwa kepemimpinan (kewirausahaan), memiliki kemampuan beradaptasi dan peka terhadap tanggung jawab sosial kemasyarakatan dan mengetahui budaya masyarakat.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang akuntan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha terhadap profesi akuntan yang berdaya saing global, mengacu kepada standar kompetensi lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC (International Federation of Accountants), yakni IES (International Education Standards). Kompetensi seperti dalam IES yang dikutip dari CA IAI (2014) adalah “Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan

pekerjaan dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja, untuk menunjukkan kompetensi dapat dilihat dari dimensi knowledge, skills, attitudes.”

Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Seperti yang diketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Ni Luh Nyoman, dkk 2014).

Jadi dengan adanya kompetensi staf akuntansi dapat diketahui apakah pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Dengan demikian masyarakat ataupun para investor dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunanya.

### **2.1.3 Penerapan Sistem Akuntansi**

#### **2.1.3.1 Sistem**

Sistem diperlukan dalam suatu unit usaha agar tujuan dapat dicapai dengan melakukan kegiatan bersama-sama oleh sebagian unsur. Menurut Robert dan Vijay

(2005:7): “sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau kelompok aktivitas”.

Sementara itu, romney dan steinhart (2006:2) menyatakan bahwa pengertian sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen cara tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan.

### **2.1.3.2 Akuntansi**

Ada beberapa pengertian akuntansi yang diungkapkan oleh penulis, dalam penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi pemerintahan diantaranya adalah *accounting principles board* seperti yang diungkapkan dalam abdul halim (2002:32) bahwa akuntansi diartikan sebagai berikut: akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang di fungsinya menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dan membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Dalam pemerintahan akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan (Nurmalia Hasanah, Achmad Fauzi, 2017 hal 1)

Akuntansi juga merupakan media komunikasi dalam dunia usaha, dimana penerapan akuntansi yang berlaku disetiap perusahaan/instansi itu berbeda. Hal ini

tergantung pada jenis atau badan usaha, besar atau kecilnya perusahaan/instansi, rumit atau tidaknya masalah keuangan perusahaan/instansi tersebut. Akuntansi dapat berjalan dengan baik jika ditunjang dengan suatu sistem yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan menurut *comite of terminology of the accounting institute of certified public accountans* (AICPA) dalam harap (2008:5) ialah “*accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in the signifikan manner and in terms of money, transactitions and events wich are, in part at least, of a financial character and interpreting the result ther of*” artinya adalah akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

### **2.1.3.3 Sistem Akuntansi**

Menurut peraturan menteri dalam negeri no 21 tahun 2011, sistem akuntansi keuangan daerah di defenisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, saran, sampai dengan pelaporan kauangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2001) menyatakan bahwa : “Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang berstruktur pula”.

Alam S (2004:8) mendefenisikan system akuntansi sebagai berikut: “Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. Akuntansi, dalam hal ini harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga mempermudah pengendalian intern dan menciptakan arus laporan yang tepat untuk kepentingan manajemen”.

Sistem Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PMK PP 71 Tahun 2010 pasal 1 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Kepmendagri No. 21 Tahun 2011).

Sistem akuntansi keuangan daerah harus diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dengan diterapkannya keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Meliputi Sebagai Berikut:

1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi adalah "Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer"

2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka menggunakan aplikasi komputer.

3) Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah

Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD.

4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Peraturan menteri dalam negeri No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas

adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintahan Daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

## **2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **2.1.4.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara (Sistem Akuntansi Pemerintahan) dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk lebih melengkapi sistem.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan selain menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efisien dan efektif. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu : transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dalam permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah suatu rangkaian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, penyelesaian, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan terhadap keuangan daerah (halim, 2017:330). Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan

umum dan pengurusan khusus, Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah Abdul Halim (2008:9). Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.1.4.2 Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung arti bahwa setiap daerah otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsi- prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105) antara lain:

1) **Transparansi**

Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran, karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat

2) **Akuntabilitas**

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3) **Value of money**

Prinsip ini sesungguhnya merupakan penerapan tiga aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu ada harga yang lebih murah. Efisiensi, penggunaan dana masyarakat harus dapat menghasilkan output maksimal atau berdataguna. Sedangkan efektif merupakan penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

#### **2.1.4.3 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang harus menjadi pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Ahmad Yani (2002:359) asas-asas pengelolaan keuangan daerah meliputi keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan pemasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bertanggung jawab merupakan

perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya. Serta kepatuhan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel II.1 dibawah ini

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Sumber
1	RR Aminati Marita Setyaningsih (2016)	Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas Dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Puskesmas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara sistem pengendalian internal dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas, dan pengaruh positif tidak signifikan antara kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan puskesmas	Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2	A Dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Jurnal Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo
3	Angga Dwi Permadi (2013)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
4	Rizkia Nur Halimah	Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peran Inspektorat terhadap Kualitas Laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,1%. Peran Inspektorat mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,6%.	Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia

## 2.3 Kerangka Konseptual

### 2.3.1 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan.

Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung

dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Ni Luh Nyoman,dkk,2014).

Penelitian pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pernah dilakukan oleh Udiyanti (2014), Assidiqi (2016), dan Albab (2015) yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan “Kompetesi Staf akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”

### **2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan negara mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan “Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”.

### **2.3.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Dalam Permendagri no.21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintahan daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan “Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”.

### **2.3.4 Pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan Daerah**

Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang

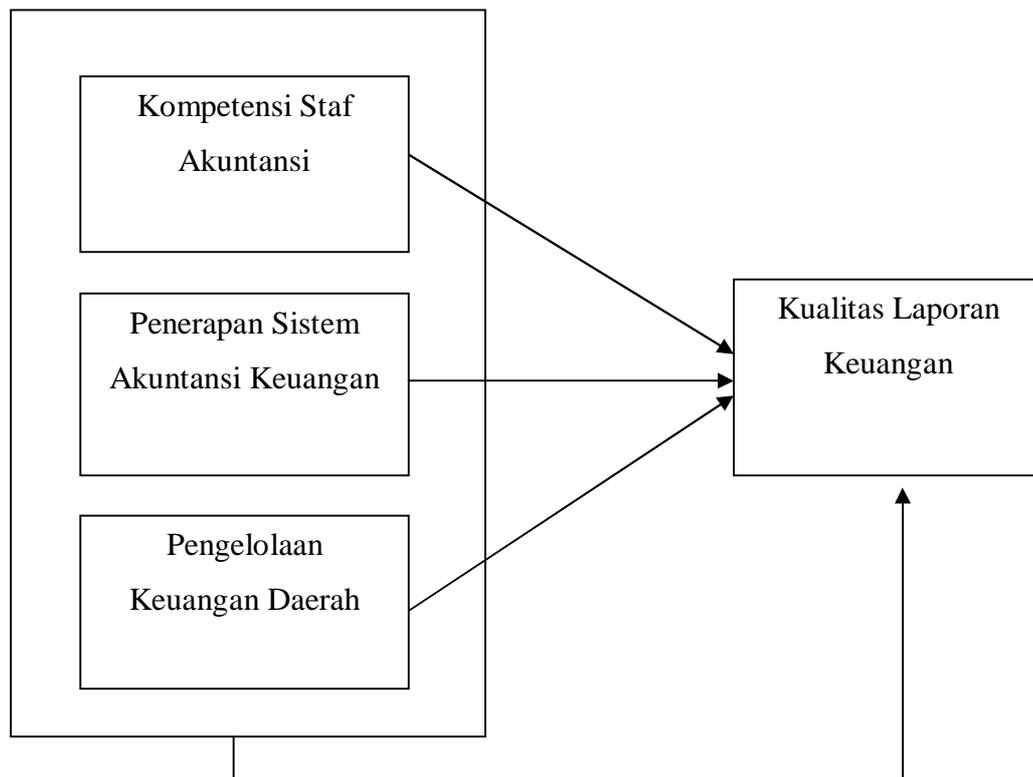
belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan “ SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan ”. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah diindonesia. Kualitas adalah: “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan” (Iman Mulyana 2010:96). Untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik sesuai dengan karakteristik laporan keuangan berdasarkan PP No.71 tahun 2010, pemerintah daerah harus dapat menciptakan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat di pahami serta didukung dari adanya kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan fungsi jabatan serta laporan keuangan yang berpedoman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Putra Mhd Nazrin (2017) menyatakan kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan pengelolaan keuangan daerah secara

bersama sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan “kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan”.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012, hal.93) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kompetensi staf akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, menurut Sugiono (2012 hal 100) “pendekatan asosiatif ini adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

##### **3.2.1 Variabel Dependen (Y)**

Menurut Sekaran (2007:116) variabel dependen (Y) adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, variabel ini dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen.

##### **3.2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)**

Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP 71 tahun 2010). Variabel diukur dengan menggunakan karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu:

- 1) Relevan
- 2) Andal
- 3) Dapat dibandingkan
- 4) Dapat dipahami

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-Ragu, (2) Tidak Setuju, dan (1) Sangat Tidak Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

### **3.2.2 Variabel Independen (X)**

Variabel independen adalah variabel yang memenuhi variabel dependen, baik secara positif, atau negatif (Sekaran, 2007:117)

#### **3.2.2.1 Kompetensi Staf Akuntansi**

Pengertian Kompetensi Menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. 46A adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Kepala Badan Kepegawaian Negara no.46A tahun 2013).

Jika kompetensi staf akuntansi dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik

dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Variabel yang diukur dengan menggunakan indikator :

- 1) Pengetahuan
- 2) Keterampilan/keahlian
- 3) Sikap (Emiati, 2015)

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-Ragu, (2) Tidak Setuju, dan (1) Sangat Tidak Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

### **3.2.2.2 Penerapan Sistem Akuntansi**

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Permendagri No. 21 tahun 2011).

Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material.

Variabel yang diukur dengan menggunakan indikator:

- 1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
- 2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
- 3) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik (permadi,2013).

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-Ragu, (2) Tidak Setuju, dan (1) Sangat Tidak Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

### **3.2.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam permendagri no 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Variabel yang diukur dengan menggunakan indikator :

- 1) Perencanaan keuangan daerah.
- 2) Pelaksanaan keuangan daerah.
- 3) Pelaporan keuangan daerah.
- 4) Pertanggungjawaban keuangan daerah.
- 5) Pengawasan keuangan daerah (Zalni,2013).

Dalam instrumen ini pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1 sampai 5. Masing-masing variabel diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-Ragu, (2) Tidak Setuju, dan (1) Sangat Tidak Setuju. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

### 3.3 Tempat dan Waktu penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian yakni pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut:

**Tabel III.1**

**Tahap Penelitian**

Proses Penelitian	Bulan / Minggu																			
	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan Data	■																			
Pengajuan Judul		■																		
Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Seminar Proposal														■						



### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data primer (*Primer Data*) yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan:

- 1) Daftar pertanyaan (Quesioner)

Teknik dan instrument dalam penelitian yang digunakan adalah berupa kuesioner (angket/daftar pertanyaan). Kuesioner ini dibagikan kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Dimana jenis skala yang digunakan adalah sekala likert.

**Table III. 2**

#### Skala Pengukuran Likert

No	Pernyataan	Bobot
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Ragu-ragu	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sugiyono (2012) hal 133

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti apakah masing-masing variabel bebas (kompetens Staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah) tersebut berpengaruh terhadap variable terikat (kualitas laporan keuangan pemerintah daerah).

#### 3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut sugiono (2012 hal 206) analisi statik deskriptif adalah analisi statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

#### 3.6.2 Uji Kualitas Data

##### 3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau keahlian suatu instrument, sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Sugiyono, 2012). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus *Product Momen Pearson* dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

Ghozali (2013) pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig.0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

- 2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

### 3.6.2.2 Uji Reabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *internal consistency*. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah *One Shot*, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa intrumen penelitian tersebut handal atau reliable (Ghozali 2013).

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan regresi, terlebih dahulu penulis melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menganalisis apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah model yang terbaik. Jika model adalah model yang baik, maka hasil analisis regresi layak dijadikan sebagai rekomendasi untuk pengetahuan atau untuk tujuan pemecahan masalah praktis.

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Ghozali (2005) mengatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini di langgar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel kecil.

Untuk mengetahui apakah ada data yang memiliki normal atau tidak, kita menggunakan uji statistik *kolmogrov-smirnov (k-s)*. Pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari :

Nilai signifikan  $<0,05$  maka distribusi data tidak normal

Nilai signifikan  $>0,05$  maka distribusi data adalah normal

Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan tes *kolmogrov-smirnov (k-s)*

#### 3.6.3.2 Uji Multikolinearilitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji

Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *Tolerance*. Jika  $VIF > 10$  dan nilai  $Tolerance < 0,10$  maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas.

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glesjer*. Jika probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

### 3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS. Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi.

Persamaan regresi linier berganda yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X1 = Kompetensi Staf Akuntansi

X2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

X3 = Pengelolaan Keuangan Daerah

$\alpha$  = Konstanta

e = Error

$\beta$  = Koefisien Regresi

secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsirkan aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya

berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

### **3.7 Koefisien Determinasi (R – Square)**

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### **3.8 Pengujian Hipotesis**

Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan atau tidak signifikan.

#### **3.8.1 Uji t**

Uji t digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji apakah variabel bebas secara individual terdapat hubungan yang parsial atau tidak terhadap variabel terikat.

#### **3.8.2 Uji f**

Uji F digunakan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas untuk dapat menjelaskan keragaman variabel terikat, serta untuk

mengetahui apakah semua variabel memiliki hubungan simultan terhadap variabel terikatnya atau koefisien regresi sama dengan nol.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Binjai. Penyebaran kuesioner diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan Kepala Keuangan, Staf Keuangan, dan Bendahara.

**Tabel IV.1**

#### **Daftar SKPD Kota Binjai**

No	SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
5	Satuan Polisi Pamong Peraja
6	Dinas Sosial
7	Dinas tenaga Kerja Dan Perindustrian perdagangan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu

17	Dinas Perpustakaan
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19	Dinas Pariwisata
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Badan Kepegawaian Daerah
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Badan penanggulangan Bencana daerah
25	KECAMATAN DAN KELURAHAN
26	RSUD DR.RM.DJOELHAM BINJAI

#### 4.1.2 Hasil Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Dimana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 40 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk degree of freedom ( $df = n - 2$ ) dengan alpha 0.05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini  $df = n - 2 (45-2) = 43$ , sehingga di dapat  $r_{tabel}$  untuk  $df (43) = 0,294$

**Tabel IV.2**

#### Uji Validitas

Variabel	Indikator	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Hasil
Kompetensi Staf Akuntansi	Pertanyaan 1	0,680	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,574	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,462	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,333	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,682	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,514	0,294	Valid
Penerapan Sistem Akuntansi	Pertanyaan 1	0,409	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,617	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,632	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,604	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,500	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,348	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,634	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,670	0,294	Valid
	Pertanyaan 9	0,635	0,294	Valid
	Pertanyaan 10	0,612	0,294	Valid

Pengelolaan Keuangan Daerah	Pertanyaan 1	0,545	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,482	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,461	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,647	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,538	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,522	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,624	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,585	0,294	Valid
	Pertanyaan 9	0,573	0,294	Valid
	Pertanyaan 10	0,647	0,294	Valid
	Pertanyaan 11	0,561	0,294	Valid
	Pertanyaan 12	0,397	0,294	Valid
	Pertanyaan 13	0,503	0,294	Valid
	Pertanyaan 14	0,455	0,294	Valid
	Pertanyaan 15	0,527	0,294	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Pertanyaan 1	0,342	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,642	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,666	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,546	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,577	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,519	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,687	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,727	0,294	Valid
	Pertanyaan 9	0,407	0,294	Valid

Sumber : Pengolahan Data SPSS V16

#### 4.1.3 Uji Reliabilitas

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Perhitungan dilakukan dengan dibantu program SPSS. Adapun hasil reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel IV.3**  
**Uji Reliabilitas**

No.	Variabel	Variabel Cronbach's alpha	r <sub>tabel</sub>	Hasil
1	Kompetensi Staf Akuntansi	0,715	0,60	Reliabel
2	Penerapan Sistem Akuntansi	0,753	0,60	Reliabel
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	0,739	0,60	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan	0,738	0,60	Reliabel

Sumber : Sumber : Pengolahan Data SPSS V16

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai cronbach alpha seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60 berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas di atas terlihat bahwa seluruh instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang diteliti dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel, sehingga data yang dihasilkan dari instrumen pernyataan dalam penelitian ini berkualitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

## **4.2 Deskripsi Data Secara Statistik**

### **4.2.1 Tingkat Identitas Responden**

Tingkat identitas responden merupakan proporsi dari sampel yang melengkapi kuesioner. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner yang diterima dari responden maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel IV.4**  
**Demografi Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Jenis Kelamin:		
a. Laki-laki	20	44,4%
b. Perempuan	25	55,6%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>
Umur :		
a. 20-30	14	31,1%
b. 31-40	18	40,0%
c. >40	13	28,9%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>
Jabatan:		
a. Kepala Keuangan	15	33,3%
b. Staf Keuangan	15	33,3%
c. Bendahara	15	33,3%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>
Pendidikan Terakhir :		
a. SMA	17	37,8%
b. D3	17	37,8%
c. S1	11	24,4%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

Sumber : Pengolahan Data SPSS V16

Bedasarkan tabel IV.4 diatas terlihat bahwa dari karakteristiknya responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai kaum perempuan, yaitu sebanyak 25 responden (55,6%). Dan sisanya pegawai laki-laki sebanyak 20 responden (44,4%). Dilihat dari karakteristik usia, responden dalam penelitian ini didominasi oleh pegawai yang berusia diantara 31-40 yaitu sebanyak 18 pegawai (40,0%), dan diikuti dengan responden yang berusia 20-30 yaitu sebanyak 14 pegawai (31,1%), responden yang berusia diatas 40 tahun sebanyak 13 pegawai (28,9%). Dilihat dari karakteristik jabatan kepala keuangan sebanyak 15 pegawai (33,3%), staf keuangan 15 pegawai (33,3%), bendahara 15 pegawai (33,3%). Dilihat dari karakteristik pendidikan terakhir didominasi oleh tamatan SMA dan

D3 sebanyak 17 Pegawai (37,8%), dan diikuti dengan strata-1 11 pegawai (24,4%).

## 4.2.2 Tingkat Jawaban Responden

### 4.2.2.1 Kompetensi Staf Akuntansi

Sebaran data berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 45 Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Binjai, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang kompetensi staf akuntansi pada tabel berikut :

**Tabel IV.5**

### **Kompetensi Staf Akuntansi**

No Per	Alternatif Jawaban											
	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	9	20,0	26	57,8	10	22,2	-	-	-	-	45	100
2	9	20,0	31	68,9	5	11,1	-	-	-	-	45	100
3	-	-	33	73,3	12	26,7	-	-	-	-	45	100
4	2	4,4	41	91,1	2	4,4	-	-	-	-	45	100
5	14	31,1	19	42,2	12	26,7	-	-	-	-	45	100
6	-	-	35	77,8	10	22,2	-	-	-	-	45	100

Sumber : Pengolahan Data SPSS V16

- a) Jawaban responden tentang Instansi/lembaga menempatkan staf yang memiliki pengetahuan keuangan, akuntansi dan pengetahuan terkait lainnya pada sub bagian keuangan/akuntansi mayoritas responden memilih setuju yaitu 57,8 % (26 orang)
- b) Jawaban responden tentang Instansi/lembaga menempatkan staf yang memiliki pengetahuan mengoperasikan komputer pada sub bagian keuangan/akuntansi akuntansi mayoritas responden memilih setuju yaitu 68,9% (31 orang)

- c) Jawaban responden tentang Instansi/lembaga menganggarkan dana untuk staf mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan secara teknis dan fungsional mayoritas responden memilih setuju yaitu 73,3% (33 orang)
- d) Jawaban responden tentang dalam instansi/lembaga komunikasi dengan rekan kerja selalu dijaga agar dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan cepat mayoritas responden memilih setuju yaitu 91,1% (41 orang)
- e) Jawaban responden tentang instansi/lembaga berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan demi kepentingan publik mayoritas responden memilih setuju yaitu 42,2% (19 orang)
- f) Jawaban responden tentang instansi/lembaga berkomitmen untuk menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan andal mayoritas responden memilih setuju yaitu 77,8% (35 orang)

#### 4.2.2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X<sub>2</sub>)

Sebaran data berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 45 Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Binjai, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pada tabel berikut:

**Tabel IV.6**

#### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan**

No Per	Alternatif Jawaban											
	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	42,2	26	57,8	-	-	-	-	-	-	45	100
2	18	40,0	27	60,0	-	-	-	-	-	-	45	100
3	14	31,1	31	68,9	-	-	-	-	-	-	45	100
4	19	42,2	26	57,8	-	-	-	-	-	-	45	100

5	13	28,9	32	71,1	-	-	-	-	-	-	45	100
6	14	31,1	31	68,9	-	-	-	-	-	-	45	100
7	16	57,8	19	42,2	-	-	-	-	-	-	45	100
8	18	40,0	27	60,0	-	-	-	-	-	-	45	100
9	13	28,9	32	71,1	-	-	-	-	-	-	45	100
10	16	35,6	29	64,4	-	-	-	-	-	-	45	100

Sumber : Pengolahan Data SPSS V16

- a) Jawaban responden tentang sistem akuntansi yang diterapkan pada dinas ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan mayoritas responden memilih setuju yaitu 57,8 % (26 orang)
- b) Jawaban responden tentang setiap transaksi keuangan pada dinas ini dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi mayoritas responden memilih setuju yaitu 60,0 % (27 orang)
- c) Jawaban responden tentang pada dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan mayoritas responden memilih setuju yaitu 68,9 % (31 orang)
- d) Jawaban responden tentang setiap transaksi keuangan pada dinas ini didukung oleh bukti transaksi mayoritas responden memilih setuju yaitu 57,8 % (26 orang)
- e) Jawaban responden tentang pada dinas ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis mayoritas responden memilih setuju yaitu 71,1 % (32 orang)
- f) Jawaban responden tentang pada dinas ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi mayoritas responden memilih setuju yaitu 68,9 % (31 orang)

- g) Jawaban responden tentang pada dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 57,8 % (26 orang)
- h) Jawaban responden tentang sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 60,0 % (27 orang)
- i) Jawaban responden tentang pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 71,1 % (32 orang)
- j) Jawaban responden tentang pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 64,4 % (29 orang)

#### 4.2.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah (X<sub>3</sub>)

Sebaran data berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 45 Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Binjai, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pada tabel berikut:

**Tabel IV.7**

#### **Pengelola Keuangan Daerah**

Alternatif Jawaban												
No per	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	33	73,3	12	26,7	-	-	-	-	-	-	45	100
2	25	55,6	20	44,4	-	-	-	-	-	-	45	100
3	27	60,0	18	40,0	-	-	-	-	-	-	45	100
4	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100

5	31	68,9	14	31,1	-	-	-	-	-	-	45	100
6	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
7	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
8	30	66,7	15	33,3	-	-	-	-	-	-	45	100
9	25	55,6	20	44,4	-	-	-	-	-	-	45	100
10	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
11	29	64,4	16	35,6	-	-	-	-	-	-	45	100
12	17	37,8	28	62,2	-	-	-	-	-	-	45	100
13	22	48,9	23	51,1	-	-	-	-	-	-	45	100
14	29	64,4	16	35,6	-	-	-	-	-	-	45	100
15	28	62,2	17	37,8	-	-	-	-	-	-	45	100

Sumber : Pengolahan Data SPSS V16

- a) Jawaban responden tentang APBD disusun dengan pendekatan kinerja mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 73,3 % (33 orang)
- b) Jawaban responden tentang pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 55,6 % (25 orang)
- c) Jawaban responden tentang jika ada perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 60,0 % (27 orang)
- d) Jawaban responden tentang setiap perangkat daerah bertugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan daerah mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 53,3 % (24 orang)
- e) Jawaban responden tentang semua manfaat yang bernilai uang merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 68,9 % (31 orang)
- f) Jawaban responden tentang pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 53,3 % (24 orang)

- g) Jawaban responden tentang tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan didalam peraturan daerah tentang APBD mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 53,3 % (24 orang)
- h) Jawaban responden tentang setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh pejabat yang berwenang mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 66,7 % (30 orang)
- i) Jawaban responden tentang pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 55,6 % (25 orang)
- j) Jawaban responden tentang pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 53,3 % (24 orang)
- k) Jawaban responden tentang laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 64,4 % (29 orang)
- l) Jawaban responden tentang laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum mayoritas responden memilih setuju yaitu 62,2 % (28 orang)
- m) Jawaban responden tentang pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD mayoritas responden memilih setuju yaitu 51,1 % (23 orang)

- n) Jawaban responden tentang setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara periode mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 64,4 % (29 orang)
- o) Jawaban responden tentang pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 62,2 % (28 orang).

#### 4.2.2.4 Kualitas laporan Keuangan (Y)

Sebaran data berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 45 Responden Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Binjai, maka dapat dilihat frekuensi jawaban responden tentang kualitas laporan keuangan pada tabel berikut berikut:

**Tabel IV.8**

#### **Kualitas laporan Keuangan**

No Per	Alternatif Jawaban											
	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	42,2	26	57,8	-	-	-	-	-	-	45	100
2	18	40,0	27	60,0	-	-	-	-	-	-	45	100
3	17	37,8	27	60,0	1	2,2	-	-	-	-	45	100
4	14	31,1	31	68,9	-	-	-	-	-	-	45	100
5	11	24,4	34	75,6	-	-	-	-	-	-	45	100
6	8	17,8	33	73,3	4	8,9	-	-	-	-	45	100
7	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
8	16	35,6	29	64,4	-	-	-	-	-	-	45	100
9	5	11,1	40	88,9	-	-	-	-	-	-	45	100

Sumber : Pengolahan Data SPSS V16

- a) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu mayoritas responden memilih setuju yaitu 57,8 % (26 orang)

- b) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang mayoritas responden memilih setuju yaitu 60,0 % (27 orang)
- c) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan/menerbitkan laporan keuangan yang tepat waktu sesuai periode akuntansi mayoritas responden memilih setuju yaitu 60,0 % (27 orang)
- d) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan laporan keuangan yang menghasilkan informasi yang lengkap mayoritas responden memilih setuju yaitu 68,9 % (31 orang)
- e) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan laporan keuangan yang menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan mayoritas responden memilih setuju yaitu 75,6 % (34 orang)
- f) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan informasi laporan keuangan apabila di uji oleh pihak yang berbeda akan menunjukkan simpulan yang sama mayoritas responden memilih setuju yaitu 73,3 % (33 orang)
- g) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan informasi laporan keuangan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu mayoritas responden memilih sangat setuju yaitu 53,3 % (24 orang)
- h) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan laporan keuangan yang menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya mayoritas responden memilih setuju yaitu 64,4 % (21 orang)

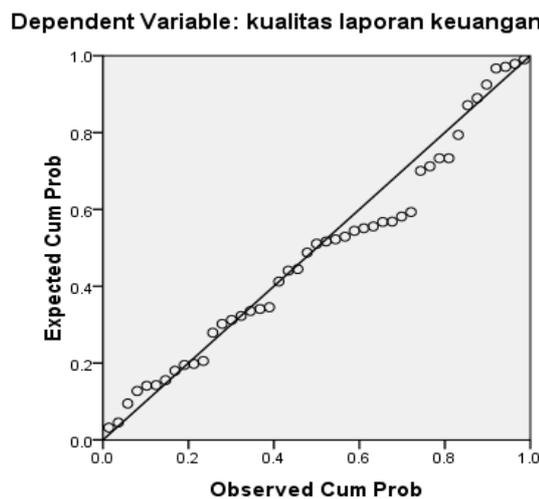
- i) Jawaban responden tentang instansi/lembaga menyajikan laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan mayoritas responden memilih setuju yaitu 88,9 % (40 orang)

### 4.3 Pengujian Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Salah satu metode untuk mengetahui normalitas data yaitu dengan menggunakan grafik normal p-plot dan grafik histogram. Berikut uji normalitas tersebut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

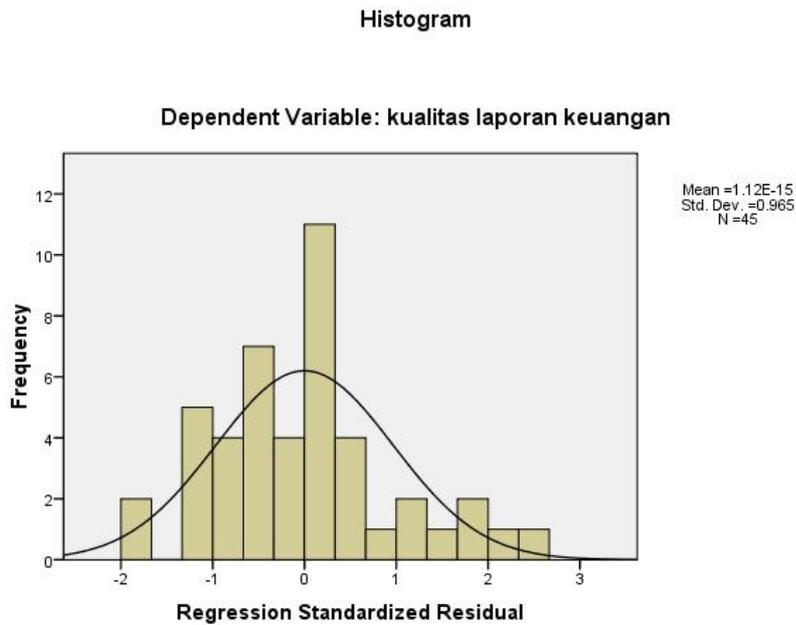


Sumber : Hasil Olah Data SPSS V16

**Gambar IV.1**

**Grafik Normal P-Plot**

Dari gambar grafik normal p-plot diatas data menyebar disekitar daerah diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi teersebut memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Hasil Olah Data SPSS V16

**Gambar IV.2**

### Gambar Histogram

Pada gambar grafik histogram jika data berdistribusi normal maka data akan membentuk semacam lonceng. Data yang baik adalah data yang memenuhi pola distribusi normal. Pada gambar grafik histogram diatas menunjukkan distribusi normal yaitu mendekati dan membentuk lonceng maka regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

### 4.3.2 Multikolinieritas

Suatu variabel dikatakan terbebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai tolerance diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut :

**Tabel IV.9**  
**Uji Multikolinieritas Data**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Staf Akuntansi	939	1.065
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	777	1.288
Pengelolaan Keuangan Daerah	738	1.259

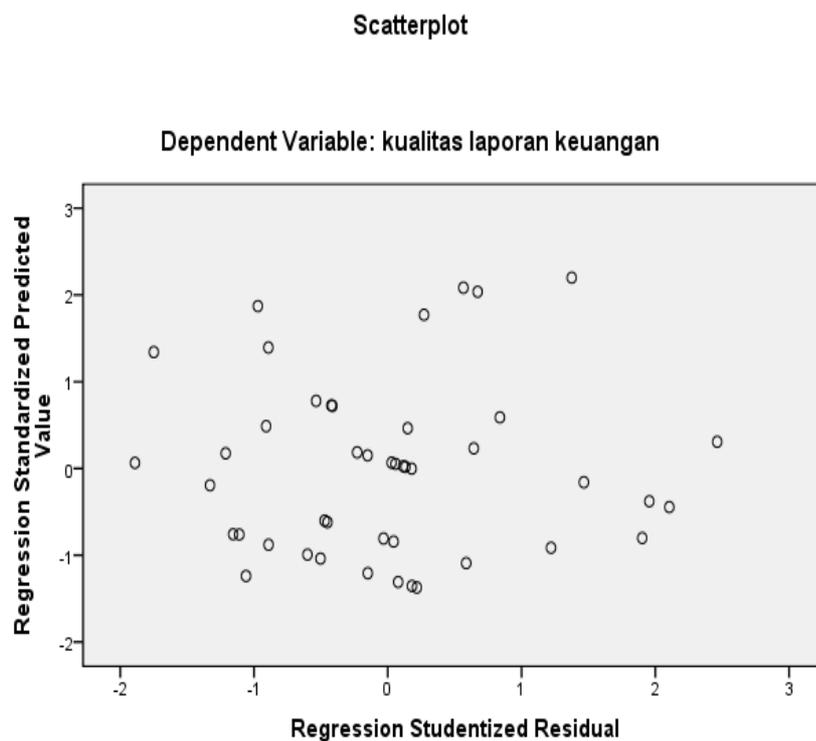
Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan  
Sumber : Hasil Olah Data SPSS V16

Tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Dengan demikian dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

### 4.3.3 Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-*studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian

menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Uji Heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Uji Heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013:105).



Sumber : Olah Data SPSS V16

**Gambar IV.3**

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

## 4.4 Analisis Data

### 4.4.1 Regresi Linier Berganda

Regresi adalah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Dalam penelitian ini regresi yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah model persamaan regresi linier dengan variabel bebas lebih dari satu.

**Tabel IV.10**

#### Hasil Regresi

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.410	3.398		.415	.680
	kompetensi staf akuntansi	-.013	.091	-.010	-.140	.889
	penerapan sistem akuntansi	.777	.071	.818	10.994	.000
	pengelolaan keuangan	.103	.047	.166	2.180	.035

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Dari tabel IV.10 diatas maka model persamaan regresi berganda adalah :

$$Y = 0,1.410 + (-0,013) + 0,777 + 0,103$$

Persamaan hasil regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar 1.410. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 1.410
- Nilai koefisien regresi variabel kompetensi staf akuntansi sebesar -0,013 artinya adalah bahwa setiap kompetensi staf akuntansi sebesar 1 satuan

maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar - 0,013 dengan asumsi variabel lain tetap.

- c. Nilai koefisien regresi variabel penerapan sistem akuntansi keuangan sebesar 0,777. Artinya adalah bahwa setiap penerapan sistem akuntansi keuangan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,777 dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Nilai koefisien regresi variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,103. Artinya adalah bahwa setiap penerapan pengelolaan keuangan daerah sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah sebesar 0,103 dengan asumsi variabel lain tetap.
- e. Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

#### 4.5 Koefisien Determinasi (R- Square)

Nilai R-Square adalah untuk melihat bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas. Adapun nilai R-Square yaitu sebagai berikut :

**Tabel IV.11**

#### Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 <sup>a</sup>	.824	.811	1.063

a. Predictors: (Constant), pengelolaan keuangan, kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi

b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber : Olah Data SPSS V16

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,811, Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 81,1%. Sedangkan sisanya 18,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

## 4.6 Pengujian Hipotesis

### 4.6.1 Uji t

Uji t dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kemampuan dari masing – masing variabel dalam mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Untuk menguji apakah kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka hipotesisnya adalah:

- 1)  $H_0$  : Secara parsial tidak ada pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 2)  $H_a$  : Secara parsial ada pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- 1)  $H_0$  diterima jika nilai probabilitas  $>$  taraf signifikan sebesar 0,05 (sig.  $>$   $\alpha$  0.05).

- 2)  $H_a$  diterima jika nilai probabilitas  $\leq$  taraf signifikan sebesar 0.05 (sig.  $\leq \alpha$  0,05).

**Tabel IV.12**

**Uji t**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.410	3.398		.415	.680
	kompetensi staf akuntansi	-.013	.091	-.010	-.140	.889
	penerapan sistem akuntansi	.777	.071	.818	10.994	.000
	pengelolaan keuangan	.103	.047	.166	2.180	.035

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber : Olah Data SPSS V16

Pada tabel IV.12 diatas hasil uji t pada kompetensi staf akuntansi memperoleh nilai signifikan 0,889 (Sig 0,889 >  $\alpha$  0,05) maka  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi memperoleh nilai signifikan 0,000 (Sig 0,000 >  $\alpha$  0,05) maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan memperoleh nilai signifikan 0,035 (Sig 0,035 <  $\alpha$  0,05) maka  $H_0$  di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### 4.6.2 Uji f

Uji F atau dikenal dengan uji signifikan secara simultan dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3

dalam mempengaruhi variabel terikat. Untuk menguji apakah kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Maka hipotesisnya adalah:

- 1)  $H_0$  : Tidak ada pengaruh signifikan kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 2)  $H_a$  : Ada pengaruh signifikan kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Maka kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- 1) Jika  $f_{sig} > 0,05$  berarti  $H_0$  diterima
- 2) Jika  $f_{sig} < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak

**Tabel IV.13**

**Uji F**

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	216.265	3	72.088	63.819	.000 <sup>a</sup>
	Residual	46.313	41	1.130		
	Total	262.578	44			

a. Predictors: (Constant), pengelolaan keuangan, kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi

b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber : Olah Data SPSS V16

Pada tabel IV.13 diatas hasil uji f secara simultan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 ( $\text{Sig } 0,000 < \alpha 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa

ada pengaruh secara simultan antara kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **4.7 Pembahasan**

### **4.7.1 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan**

#### **Keuangan Daerah**

Berdasarkan uji t diketahui bahwa kompetensi staf akuntansi memperoleh nilai signifikan 0,889 (Sig 0,889 >  $\alpha$  0,05) maka  $H_0$  diterima. Dapat dinyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia/ staf tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Binjai, dikarenakan pemerintah daerah memberikan pendidikan/pelatihan, serta memberikan penyuluhan kepada staf akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Akan tetapi, penyebab lainnya dikarenakan masih terdapatnya staf akuntansi yang penempatannya tidak disesuaikan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh staf akuntansi tersebut, jika pemerintah daerah menempatkan staf akuntansi sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki oleh masing-masing staf akuntansi maka akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Jika kompetensi staf akuntansi dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi staf akuntansi ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2014) tentang pengaruh sumber daya manusia dibidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan mendapatkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.7.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan uji t dapat diketahui bahwa penerapan sistem akuntansi memperoleh nilai signifikan 0,000 (Sig 0,000 >  $\alpha$  0,05) maka H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh antara penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintahan Kota Binjai telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri no 21 tahun 2011 yang berisi prosedur akuntansi dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota binjai telah melakukan sistem akuntansi yang sesuai dengan prosedur akuntansi serta dapat diterima umum. Dengan diberlakukannya penerapan sistem akuntansi yang telah sesuai dengan perundang-undangan serta telah sesuai dengan Sandart Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik serta dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh A dahri Adi Patra, Lanteng Bustami, Hasriani (2015) yang berdasarkan hasil penelitiannya bahwa penerapan sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **4.7.3 Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan uji t diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai signifikan 0,035 (Sig 0,035 <  $\alpha$  0,05) maka H<sub>0</sub> di tolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, dengan pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini dikarenakan pemerintah daerah telah melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan berdasarkan undang-undang, pengelolaan keuangan yang baik yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula.

Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian masyarakat dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunaannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rizkia Nur Halimah (2014)

yang hasil penelitiannya bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **4.7.4 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan uji f diatas dapat diketahui bahwa kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh nilai signifikan 0,000 (Sig 0,000 <  $\alpha$  0,05) maka H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi melalui adjusted R Square sebesar 0,811 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah sebesar 81,1% sedangkan sisanya 18,9% dipengaruhi variabel yang tidak diteliti oleh peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kompeten staf akuntansi baik, penerapan sistem akuntansi telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka secara bersama-sama akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik/berkualitas.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel kompetensi staf akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Binjai. Hal ini dikarenakan perlunya staf yang berkompentensi akuntansi dalam pemahaman akuntansi untuk menciptakan laporan keuangan yang akurat dan bisa menggambarkan kondisi keuangan pada suatu instansi pemerintahan.
- 2) Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel, penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kota Binjai. Hal ini dapat dilihat dari jelasnya prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer yang dilakukan untuk dapat menghasilkan dan memudahkan penyusunan laporan keuangan oleh instansi terkait.

- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kota Binjai. Hal ini dikarenakan telah terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik.
- 4) Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa variabel kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan, pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## **5.2 Saran**

- 1) Bagi pemerintahan agar lebih meningkatkan kembali kompetensi bagi setiap staf akuntansi pada setiap SKPD di kota Binjai serta menerapkan perekrutan staf berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing staf agar lebih meningkatkan kualitas atas laporan keuangan, pemerintahan juga diharapkan mempertahankan penerapan sistem akuntansi yang telah digunakan serta pengelolaan keuangan agar dapat di laporkan dalam tepat waktu, serta diharapkan pemerintah daerah agar melakukan penyuluhan terhadap setiap SKPD di kota Binjai agar menerapkan peraturan PP.71 tahun 2010 agar lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan bagi pemerintah daerah kota Binjai.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan sampel, metode penelitian dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arfan Ikhsan, Dkk. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Citapustaka Media
- Dewi Andini Yusrawani. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten lawang Sumatera Selatan)*. Jurnal Universitas Riau, Vol: 24 no. 1 Juni 2015.
- Hasanah, Nurmelia, Ahmad Fauzi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. In Media
- Hasrani, Dkk. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah palopo
- Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara no 7 tahun 2013 tentang *pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai*.
- Muindro Renyowijoko. 2013. *Akuntansi Sektor publik organisasi non laba*, Edisi 3, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no.21 tahun 2011 tentang *Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no.21 tahun 2011 perubahan kedua dari permendagri no.13 tahun 2006 Tentang *Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah no.71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah no.58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan keuangan Daerah*.
- Permadi, Angga Dwi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

*Daerah (Studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).  
Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.*

Republik Indonesia, Undang-undang no.15 tahun 2014 tentang *Pemeriksaan  
Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara.*

Republik Indonesia, Undang-undang no.25 tahun 2004 tentang *Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional.*

Republik Indonesia, Undang-undang no.33 tahun 2004 tentang *Pertimbangan  
Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia, Undang-undang no.17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Republik Indonesia, Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang *Pemerintah  
Daerah.*

RR Aminati Marita Setyaningsih. 2016. *Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap  
Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas Dengan Penerapan Standar  
Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris  
pada Puskesmas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).* Skripsi  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

(<http://medan.bpk.go.id/>)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi:

Nama : Khairina Adriani  
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 30 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jln. Alfalah 3 No. 6, Medan  
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara  
Nama Orang Tua:  
Nama Ayah : (Alm) Drs. Ali Adenin  
Nama Ibu : Elma Riani  
Alamat Orang Tua : jln. MT.Haryono GG. A. KARIM LK III,  
Kel Jati Karya, kec Binjai Utara

### Pendidikan formal:

- SD Negeri 024760 Binjai Utara (25 Juni 2008)
- Mts Al-Ulum Medan (4 Juni 2011)
- SMK Negeri 1 Medan (20 Mei 2014)
- Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2014 - Sekarang)

Medan, Maret 2018

**Khairina Adriani**

**Kepada Yth**

**Bapak/ibu/sdr/i Responden**

**Di Tempat**

Dengan Hormat Saya dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bermaksud untuk melakukan penelitian. Penelitian yang Saya lakukan mempunyai tujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan maksud di atas, Saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/ibu untuk bersedia mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan pendapat dan pengalaman yang dimiliki.

Jawaban Bapak/ibu atas pertanyaan yang di ajukan sangat berharga bagi Saya dan akan membuat kontribusi penting bagi penelitian ini. Oleh karena itu bapak/ibuk diharapkan dapat memberikan jawaban sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Tidak ada jawaban benar atau salah, yang Saya harapkan adalah pendapat Bapak/ibu.

Kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuisisioner ini sangat menentukan validitas dan keberhasilan penelitian ini. Atas perhatian dan bantuan Bapak/ibu Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Peneliti

## KUISIONER

### PENGARUH KOMPETENSI STAF AKUNTANSI, PENERAPAN SITEM AKUNTANSI KEUANGAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI

#### Identitas Responden

Nomor Responden : ..... (Diisi oleh peneliti)

Nama Instansi : .....

Jabatan : .....

Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan

Umur : .....

Pendidikan Terakhir :  SMA  D3  S1  S2  S3

Masa Kerja :  < 5 Tahun  5 – 10 Tahun  > 10 Tahun

#### Petunjuk Pengisian

1. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kuisisioner dimohonkan kepada responden untuk terlebih dahulu mengisi identitas sesuai dengan formulir isian yang disediakan.
2. Bacalah pertanyaan/ pernyataan secara teliti dan berikan tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban yang benar menurut bapak/ibuk.
3. Dimohonkan untuk tidak mencoba menganalisis pertanyaan secara intensif, dan jawablah sesuai dengan pengalaman/pendapat anda sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun (jujur), karena tidak ada jawaban yang salah atau benar.
4. Dimohonkan untuk tidak mendiskusikan pertanyaan/jawaban kepada orang lain.

## KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Mohon bapak/ibuk memberikan tanda ( X ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibuk.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO	PERTANYAAN	SS 5	S 4	R 3	TS 2	STS 1
1	Instansi/lembaga menyajikan Laporan keuangan yang menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.					
2	Instansi/lembaga menyajikan Laporan keuangan yang menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.					
3	Instansi/lembaga menyajikan/menerbitkan laporan keuangan yang tepat waktu sesuai periode akuntansi.					
4	Instansi/lembaga menyajikan Laporan keuangan yang menghasilkan informasi yang lengkap.					
5	Instansi/lembaga menyajikan Laporan keuangan yang menghasilkan informasi yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.					
6	Instansi/lembaga menyajikan Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan menunjukkan simpulan yang sama.					
7	Instansi/lembaga menyajikan Informasi laporan keuangan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					
8	Instansi/lembaga menyajikan Laporan keuangan yang menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
9	Instansi/lembaga menyajikan Informasi laporan keuangan yang dapat dipahami oleh pemakai laporan keuangan.					

Sumber : Putra Mhd Nazrin (2017)

## KOMPETENSI STAF AKUNTANSI

Mohon bapak/ibuk memberikan tanda ( X ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibuk.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO	PERTANYAAN	SS 5	S 4	R 3	TS 2	STS 1
1	Instansi/lembaga menempatkan staf yang memiliki pengetahuan keuangan, akuntansi dan pengetahuan terkait lainnya pada sub bagian keuangan/akuntansi.					
2	Instansi/lembaga menempatkan staf yang memiliki pengetahuan mengoperasikan komputer pada sub bagian keuangan/akuntansi.					
3	Instansi/lembaga mengalokasikan dana untuk staf mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan secara teknis dan fungsional.					
4	Dalam Instansi/lembaga komunikasi dengan rekan kerja selalu dijaga agar dapat membantu penyelesaian pekerjaan dengan cepat.					
5	Instansi/lembaga berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan keuangan demi kepentingan publik.					
6	Instansi/lembaga berkomitmen untuk menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan andal.					

Sumber : Putra Mhd Nazrin (2017)

## PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN

Mohon bapak/ibuk memberikan tanda ( X ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibuk.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO	PERTANYAAN	SS 5	S 4	R 3	TS 2	STS 1
1	Sistem Akuntansi yang di terapkan pada Dinas ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan					
2	Setiap transaksi keuangan pada dinas ini dilakukan dengan analisis transaksi/ identifikasi transaksi					
3	Pada Dinas ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan					
4	Setiap transaksi keuangan pada Dinas ini didukung oleh bukti transaksi					
5	Pada Dinas ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis					
6	Pada Dinas ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi					
7	Pada Dinas ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya					
8	Sitem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan					
9	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi					
10	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik					

Sumber : Putra Mhd Nazrin (2017)

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Mohon bapak/ibuk memberikan tanda ( X ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibuk.

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

R : Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO	PERTANYAAN	SS 5	S 4	R 3	TS 2	STS 1
1	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
2	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan					
3	Jika ada perubahan, APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir					
4	Setiap perangkat daerah yang bertugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan daerah					
5	Semua manfaat yang bernilai uang merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD					
6	Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
7	Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang APBD					
8	Setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi oleh pejabat yang berwenang					
9	Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah					
10	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan					
11	Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi					

12	Laporan keuangan dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan standar akuntansi yang diterima umum					
13	Pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD					
14	Setiap pejabat pengelolaan keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodic					
15	Pengawasan atas APBD dilakukan oleh DPRD					

Sumber : Putra Mhd Nazrin (2017)

## Daftar SKPD Kota Binjai

No	SKPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
5	Satuan Polisi Pamong Peraja
6	Dinas Sosial
7	Dinas tenaga Kerja Dan Perindustrian perdagangan
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Perhubungan
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
17	Dinas Perpustakaan
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19	Dinas Pariwisata
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
22	Badan Kepegawaian Daerah
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
24	Badan penanggulangan Bencana daerah
25	Kecamatan Dan Kelurahan
26	Rsud Dr.Rm.Djoelham Binjai

## Uji Validitas

Variabel	Indikator	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Hasil
Kompetensi Staf Akuntansi	Pertanyaan 1	0,680	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,574	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,462	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,333	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,682	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,514	0,294	Valid
Penerapan Sistem Akuntansi	Pertanyaan 1	0,409	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,617	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,632	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,604	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,500	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,348	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,634	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,670	0,294	Valid
	Pertanyaan 9	0,635	0,294	Valid
	Pertanyaan 10	0,612	0,294	Valid
Pengelolaan Keuangan Daerah	Pertanyaan 1	0,545	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,482	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,461	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,647	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,538	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,522	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,624	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,585	0,294	Valid
	Pertanyaan 9	0,573	0,294	Valid
	Pertanyaan 10	0,647	0,294	Valid
	Pertanyaan 11	0,561	0,294	Valid
	Pertanyaan 12	0,397	0,294	Valid
	Pertanyaan 13	0,503	0,294	Valid
	Pertanyaan 14	0,455	0,294	Valid
	Pertanyaan 15	0,527	0,294	Valid
Kualitas Laporan Keuangan	Pertanyaan 1	0,342	0,294	Valid
	Pertanyaan 2	0,642	0,294	Valid
	Pertanyaan 3	0,666	0,294	Valid
	Pertanyaan 4	0,546	0,294	Valid
	Pertanyaan 5	0,577	0,294	Valid
	Pertanyaan 6	0,519	0,294	Valid
	Pertanyaan 7	0,687	0,294	Valid
	Pertanyaan 8	0,727	0,294	Valid

	Pertanyaan 9	0,407	0,294	Valid
--	--------------	-------	-------	-------

### Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Variabel Cronbach's alpha	r <sub>tabel</sub>	Hasil
1	Kompetensi Staf Akuntansi	0,715	0,60	Reliabel
2	Penerapan Sistem Akuntansi	0,753	0,60	Reliabel
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	0,739	0,60	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan	0,738	0,60	Reliabel

### Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
a. Laki-laki	20	44,4%
b. Perempuan	25	55,6%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>
Umur :		
a. 20-30	14	31,1%
b. 31-40	18	40,0%
c. >40	13	28,9%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>
Jabatan:		
a. Kepala Keuangan	15	33,3%
b. Staf Keuangan	15	33,3%
c. Bendahara	15	33,3%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>
Pendidikan Terakhir :		
a. SMA	17	37,8%
b. D3	17	37,8%
c. S1	11	24,4%
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

**Kompetensi Staf Akuntansi (X1)**

Alternatif Jawaban												
No Per	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	9	20,0	26	57,8	10	22,2	-	-	-	-	45	100
2	9	20,0	31	68,9	5	11,1	-	-	-	-	45	100
3	-	-	33	73,3	12	26,7	-	-	-	-	45	100
4	2	4,4	41	91,1	2	4,4	-	-	-	-	45	100
5	14	31,1	19	42,2	12	26,7	-	-	-	-	45	100
6	-	-	35	77,8	10	22,2	-	-	-	-	45	100

**Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (X2)**

Alternatif Jawaban												
No Per	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	42,2	26	57,8	-	-	-	-	-	-	45	100
2	18	40,0	27	60,0	-	-	-	-	-	-	45	100
3	14	31,1	31	68,9	-	-	-	-	-	-	45	100
4	19	42,2	26	57,8	-	-	-	-	-	-	45	100
5	13	28,9	32	71,1	-	-	-	-	-	-	45	100
6	14	31,1	31	68,9	-	-	-	-	-	-	45	100
7	16	57,8	19	42,2	-	-	-	-	-	-	45	100
8	18	40,0	27	60,0	-	-	-	-	-	-	45	100
9	13	28,9	32	71,1	-	-	-	-	-	-	45	100
10	16	35,6	29	64,4	-	-	-	-	-	-	45	100

**Pengelola Keuangan Daerah (X1)**

Alternatif Jawaban												
No per	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	33	73,3	12	26,7	-	-	-	-	-	-	45	100
2	25	55,6	20	44,4	-	-	-	-	-	-	45	100
3	27	60,0	18	40,0	-	-	-	-	-	-	45	100
4	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
5	31	68,9	14	31,1	-	-	-	-	-	-	45	100
6	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
7	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100

8	30	66,7	15	33,3	-	-	-	-	-	-	45	100
9	25	55,6	20	44,4	-	-	-	-	-	-	45	100
10	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
11	29	64,4	16	35,6	-	-	-	-	-	-	45	100
12	17	37,8	28	62,2	-	-	-	-	-	-	45	100
13	22	48,9	23	51,1	-	-	-	-	-	-	45	100
14	29	64,4	16	35,6	-	-	-	-	-	-	45	100
15	28	62,2	17	37,8	-	-	-	-	-	-	45	100

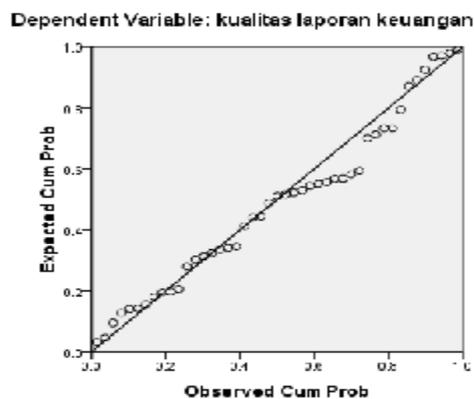
### Kualitas laporan Keuangan (Y)

Alternatif Jawaban												
No Per	SS		S		RR		TS		STS		JUMLAH	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	42,2	26	57,8	-	-	-	-	-	-	45	100
2	18	40,0	27	60,0	-	-	-	-	-	-	45	100
3	17	37,8	27	60,0	1	2,2	-	-	-	-	45	100
4	14	31,1	31	68,9	-	-	-	-	-	-	45	100
5	11	24,4	34	75,6	-	-	-	-	-	-	45	100
6	8	17,8	33	73,3	4	8,9	-	-	-	-	45	100
7	24	53,3	21	46,7	-	-	-	-	-	-	45	100
8	16	35,6	29	64,4	-	-	-	-	-	-	45	100
9	5	11,1	40	88,9	-	-	-	-	-	-	45	100

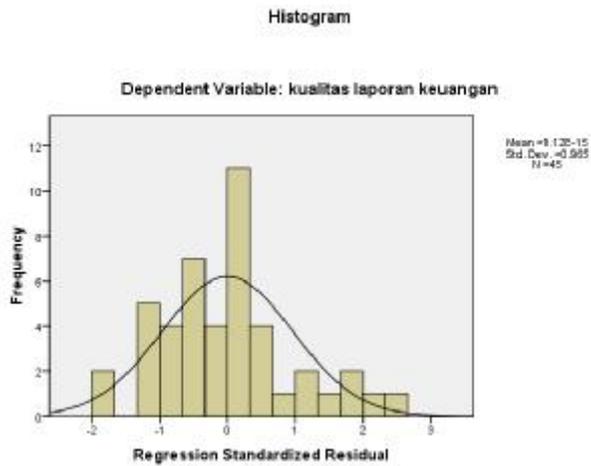
### Uji Normalitas

#### P-plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



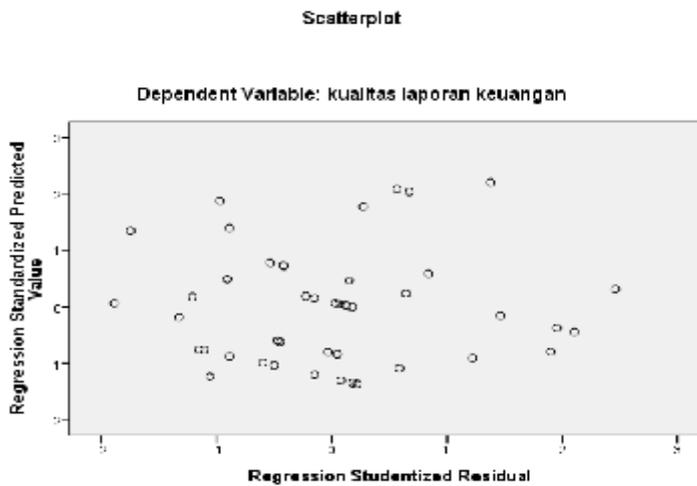
## Histogram



## Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kompetensi Staf Akuntansi	939	1.065
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	777	1.288
Pengelolaan Keuangan Daerah	738	1.259

## Heterokedastisitas



## Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.410	3.398		.415	.680
kompetensi staf akuntansi	-.013	.091	-.010	-.140	.889
penerapan sistem akuntansi	.777	.071	.818	10.994	.000
pengelolaan keuangan	.103	.047	.166	2.180	.035

## Uji Koefisien Determinasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 <sup>a</sup>	.824	.811	1.063

## Uji t

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.410	3.398		.415	.680
	kompetensi staf akuntansi	-.013	.091	-.010	-.140	.889
	penerapan sistem akuntansi	.777	.071	.818	10.994	.000
	pengelolaan keuangan	.103	.047	.166	2.180	.035

## Uji F

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	216.265	3	72.088	63.819	.000 <sup>a</sup>
	Residual	46.313	41	1.130		
	Total	262.578	44			